



---

## Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat dalam Meningkatkan Kapasitas Penangkapan Ikan dan Kesejahteraan Nelayan Sumatera Barat

Jihan Anfiska<sup>1</sup>, Aldri Frinaldi<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang  
[jihananfiska21@gmail.com](mailto:jihananfiska21@gmail.com), [aldri@fis.unp.ac.id](mailto:aldri@fis.unp.ac.id)

### Abstrak

Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat pesisir di Kota Padang. Namun, nelayan skala kecil masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas operasional dan kerentanan sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program peningkatan kapasitas penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak DKP dan pengurus kelompok nelayan, observasi lapangan di Bungus Teluk Kabung, Pasia Nan Tigo, dan Pasia Jambak, serta analisis dokumen rekapitulasi pemeriksaan kapal periode 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sarana produksi (mesin tempel, perahu, jaring, dan *fishbox*) efektif meningkatkan jangkauan penangkapan dan kualitas hasil tangkapan. Namun, tingkat kepatuhan administrasi kapal masih perlu ditingkatkan, di mana terdapat 12,06% kapal yang tidak memiliki dokumen perizinan lengkap sehingga berpotensi memicu praktik *illegal fishing*. Selain itu, kesenjangan kesejahteraan masih terjadi akibat fluktuasi iklim dan tingginya biaya operasional. Disimpulkan bahwa pemberdayaan nelayan tidak cukup hanya bergantung pada bantuan fisik, melainkan membutuhkan penguatan kelembagaan, fasilitasi modal formal, dan pendampingan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Nelayan, Kebijakan Publik, Perikanan Tangkap, Kapasitas Penangkapan, Kota Padang.

### Abstract

The marine and fisheries sector plays a strategic role in supporting food security and the coastal economy in Padang City. However, small-scale fishermen still face limitations in operational capacity and socio-economic vulnerabilities. This study aims to analyze the effectiveness of the fishing capacity building and fishermen empowerment programs implemented by the Marine Affairs and Fisheries Department (DKP) of West Sumatra Province in Padang City. A qualitative-descriptive approach was employed in this research. Data were gathered through in-depth interviews with DKP officials and fishermen group leaders, field observations in Bungus Teluk Kabung, Pasia Nan Tigo, and Pasia Jambak, as well as document analysis of vessel inspection records from 2021 to 2025. The results indicate that the distribution of production aids (outboard engines, boats, nets, and fishboxes) effectively expanded fishing grounds and preserved catch quality. Nevertheless, administrative compliance remains a challenge, with 12.06% of inspected vessels lacking complete permits, potentially driving illegal fishing practices. Furthermore, a welfare gap persists due to climate fluctuations and high operational costs. It is concluded that empowering fishermen requires more than physical assistance; it demands institutional strengthening, access to formal capital, and continuous mentoring.

**Keywords:** Fishermen Empowerment, Public Policy, Capture Fisheries, Fishing Capacity, Padang City.

### 1. Pendahuluan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat dunia. Organisasi pangan dunia menegaskan bahwa perikanan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia protein hewani bagi miliaran penduduk dunia, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat pesisir. Dalam perspektif Ilmu Administrasi Negara, kondisi ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah sebagai aktor utama dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik yang mampu menjamin pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (Nisari et al., 2025). Efektivitas dan keberhasilan implementasi kebijakan sektor publik ini sangat bergantung pada tata kelola administrasi publik serta komitmen birokrasi dalam merespons kebutuhan nyata masyarakat (Frinaldi, 2017). Sektor perikanan juga berkontribusi signifikan terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian ekosistem laut. Meskipun demikian, kelompok nelayan masih rentan terhadap kemiskinan akibat ketergantungan pada kondisi alam, keterbatasan teknologi, modal, serta akses informasi pasar (Nurliani et al., 2023).

---

Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Desa Tegal Arum  
Kabupaten Tebo

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah laut mencapai 6,4 juta km<sup>2</sup> memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat besar. Regulasi penangkapan ikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, di mana pemanfaatan sumber daya ikan wajib dilakukan secara terkendali dan berkelanjutan melalui instrumen perizinan dan pembatasan alat tangkap. Kontribusi sektor ini terus menunjukkan tren positif; Kementerian Kelautan dan Perikanan (2024) melaporkan bahwa produksi perikanan tangkap nasional tahun 2024 meningkat melampaui target. Kendati demikian, pembangunan perikanan tangkap nasional masih dihadapkan pada tantangan pelik seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya penguasaan teknologi, tingginya biaya operasional melaut, hingga dampak fluktuasi cuaca akibat perubahan iklim global (Rahim et al., 2023; Kewilaa, 2024).

Dalam sistem pemerintahan desentralistis di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyerahkan kewenangan pengelolaan serta pemberdayaan masyarakat nelayan kepada pemerintah daerah. Di tingkat daerah, pelaksanaan fungsi ini dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) melalui penyediaan bantuan sarana prasarana, fasilitasi modal, pembinaan, serta perlindungan sosial bagi nelayan. Keberhasilan program pemerintah daerah ini tidak terlepas dari kualitas pelayanan publik dan optimalisasi kapasitas aparatur birokrasi dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan pemberdayaan (Frinaldi & Embi, 2011).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah pesisir barat Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan memiliki potensi sumber daya ikan pelagis maupun demersal yang tinggi. Sektor perikanan menjadi penggerak utama ekonomi lokal di wilayah ini. Namun, nelayan di Sumatera Barat masih dibayangi berbagai masalah struktural, keterbatasan alat tangkap, serta tingginya ketidakpastian pendapatan yang memicu tekanan sosial-ekonomi (Gushendri et al., 2023). DKP Provinsi Sumatera Barat memiliki mandat strategis untuk mengatasi persoalan ini melalui perumusan kebijakan, pembinaan teknis, serta program pemberdayaan (Mufti et al., 2025). Implementasi kebijakan diwujudkan lewat distribusi bantuan sarana produksi seperti mesin tempel (5 PK, 15 PK, 40 PK), perahu, jaring ikan, dan *fishbox*.

Selain masalah kapasitas, tantangan fatal yang timbul di perairan Sumatera Barat adalah maraknya pelanggaran administrasi dan praktik penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*). Sesuai UU No. 45 Tahun 2009, kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen resmi merupakan bentuk pelanggaran hukum. Dokumen seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Layak Operasi (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan Surat Kelaikan Kapal (SKK) sangat krusial sebagai instrumen pengawasan dan keselamatan pelayaran. Berdasarkan data DKP Provinsi Sumatera Barat, tingkat kepatuhan administrasi kapal nelayan selama rentang 2021–2025 disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Hasil Pemeriksaan Kapal Nelayan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2025

| No           | Tahun | Jumlah Diperiksa   | Kapal | Dokumen Lengkap                       | Dokumen Tidak Lengkap               | Tidak Lengkap |
|--------------|-------|--------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 1            | 2021  | 530 kapal          |       | 447 kapal                             | 83 kapal                            |               |
| 2            | 2022  | 638 kapal          |       | 550 kapal                             | 88 kapal                            |               |
| 3            | 2023  | 530 kapal          |       | 480 kapal                             | 50 kapal                            |               |
| 4            | 2024  | 306 kapal          |       | 285 kapal                             | 21 kapal                            |               |
| 5            | 2025  | 20 kapal           |       | 18 kapal                              | 2 kapal                             |               |
| <b>Total</b> |       | <b>2.024 kapal</b> |       | <b>1.780 kapal</b><br><b>(87,94%)</b> | <b>244 kapal</b><br><b>(12,06%)</b> | <b>kapal</b>  |

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat (2025)*

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 2.024 total kapal yang diperiksa, terdapat 244 kapal (12,06%) yang dokumennya tidak lengkap. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan administrasi perikanan masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Di samping isu regulasi, studi Aprilia et al. (2024) mempertegas bahwa hasil tangkapan nelayan Sumatera Barat sangat bergantung pada faktor musim dan kondisi perairan, sementara Mulyani et al. (2023) menyoroti pentingnya ketersediaan sarana pendukung seperti Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk menjaga efisiensi dan stabilitas harga jual hasil tangkapan.

Kota Padang berdiri sebagai sentra utama perikanan tangkap di Sumatera Barat dengan dukungan fasilitas infrastruktur yang terbilang paling lengkap dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Kendati demikian,

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12932>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

permasalahan *illegal fishing* dan pelanggaran ketentuan perikanan masih menjadi ancaman nyata. Hal ini dikonfirmasi melalui wawancara awal dengan Pengawas Perikanan Ahli Muda DKP Provinsi Sumatera Barat, Bapak Yuniwel Hendri, S.Pi.:

*"...wilayah perairan Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar serta menjadi tumpuan utama mata pencaharian masyarakat pesisir. Namun, potensi tersebut juga diiringi oleh tingginya kerentanan terhadap praktik illegal Fishing yang berlangsung secara berulang di berbagai wilayah perairan. Praktik penangkapan ikan secara ilegal tidak hanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan stabilitas sosial ekonomi masyarakat nelayan lokal."*

**(Wawancara, 20 Januari 2026)**

Pernyataan di atas menegaskan adanya polemik dalam aktivitas penangkapan ikan di Kota Padang, seperti penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan ketiadaan izin sah. Realitas sosial nelayan perikanan tangkap di Kota Padang hingga saat ini masih dihadapkan pada keterbatasan struktural. Mayoritas nelayan merupakan nelayan skala kecil dengan armada sederhana dan jangkauan operasi terbatas, sehingga produktivitasnya sangat fluktuatif (Windi, 2025). Keterbatasan sarana penunjang seperti bahan bakar, alat navigasi, dan teknologi penyimpanan turut memperparah kerentanan ekonomi mereka.

Aktivitas perikanan tangkap di Kota Padang berpusat pada beberapa kawasan pesisir utama dengan karakteristik beragam, seperti Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kelurahan Pasia Nan Tigo (Koto Tengah), dan Pasia Jambak. Bungus Teluk Kabung ditopang oleh Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus sebagai pusat distribusi, logistik, perizinan, dan pengawasan. Sebaliknya, kawasan Pasia Nan Tigo dan Pasia Jambak didominasi oleh nelayan tradisional yang sangat membutuhkan pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, serta fasilitasi teknologi penangkapan ikan (Nurmahmudin et al., 2024).

Terjadinya gap antara besarnya potensi sumber daya laut dengan masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan menunjukkan bahwa peningkatan produksi perikanan tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir (Mufti et al., 2025). Walaupun DKP Provinsi Sumatera Barat telah meluncurkan berbagai intervensi program—baik berupa bantuan sarana fisik maupun pelatihan keterampilan—efektivitas program pemberdayaan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan struktural nelayan di lapangan masih memerlukan evaluasi dan kajian empiris yang mendalam. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas serta implementasi program peningkatan kapasitas penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Kota Padang.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam efektivitas program pemberdayaan serta peningkatan kapasitas penangkapan ikan bagi nelayan di Kota Padang (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian dilaksanakan di tiga kawasan pesisir utama Kota Padang, yaitu Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Pasia Nan Tigo (Koto Tengah), dan Pasia Jambak. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* berdasarkan tingkat konsentrasi aktivitas perikanan tangkap dan variasi karakteristik nelayan di wilayah tersebut (Sugiyono, 2019).

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci, seperti Pengawas Perikanan Ahli Muda Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat, pengurus kelompok nelayan, serta nelayan sasaran program. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk mengamati langsung aktivitas penangkapan, pemanfaatan sarana bantuan, dan kelaikan administrasi kapal (Moleong, 2021). Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi DKP Provinsi Sumatera Barat berupa laporan kinerja, undang-undang, serta rekapitulasi data pemeriksaan kapal periode 2021–2025.

Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles et al. (2014), yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna memastikan validitas serta objektivitas temuan penelitian (Miles et al., 2014; Sugiyono, 2019).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Implementasi dan Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan di Kota Padang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan nelayan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang terfokus pada intervensi fisik dan peningkatan kapasitas operasional. Intervensi ini diwujudkan melalui penyaluran bantuan sarana produksi, seperti mesin tempel (berkapasitas 5 PK, 15 PK, dan 40 PK), perahu motor, jaring penangkap ikan, serta *fishbox*. Bantuan sarana ini ditujukan untuk memodernisasi armada nelayan skala kecil di kawasan Bungus Teluk Kabung, Pasia Nan Tigo, dan Pasia Jambak.

Secara operasional, bantuan tersebut berhasil meningkatkan mobilitas dan memperluas jangkauan daerah penangkapan ikan (*fishing ground*). Nelayan yang sebelumnya terbatas pada area pesisir dangkal kini mampu menjangkau perairan yang lebih jauh dengan waktu tempuh yang lebih efisien. Pemanfaatan *fishbox* juga terbukti menekan tingkat kerusakan fisik ikan (*post-harvest losses*), sehingga kualitas dan nilai jual hasil tangkapan tetap terjaga hingga sampai di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) maupun Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Temuan ini sejalan dengan teori efektivitas program publik dari Campbell (1988), yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu intervensi diukur dari sejauh mana output program mampu mentransformasi kapasitas penerima manfaat secara berkelanjutan. Pemberdayaan melalui bantuan sarana merupakan langkah krusial dalam memutus rantai kemiskinan struktural masyarakat pesisir (Mulyani et al., 2023). Namun demikian, efektivitas bantuan ini belum sepenuhnya merata. Sebagian nelayan tradisional di Pasia Nan Tigo masih menghadapi kendala tingginya biaya operasional, khususnya lonjakan harga bahan bakar dan perawatan mesin, yang sering kali menggerus margin keuntungan yang diperoleh (Rahim et al., 2023).

#### **Tantangan Kepatuhan Administrasi dan Praktik *Illegal Fishing***

Di samping aspek produksi, penelitian ini mengungkapkan bahwa kepatuhan administrasi dan legalitas penangkapan ikan masih menjadi persoalan krusial di Kota Padang. Berdasarkan data DKP Provinsi Sumatera Barat periode 2021–2025, dari total 2.024 kapal nelayan yang diperiksa, terdapat 244 kapal (12,06%) yang terbukti beroperasi tanpa dokumen administrasi yang lengkap. Dokumen wajib seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Layak Operasi (SLO), dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sering kali diabaikan oleh nelayan skala kecil.

Rendahnya kepatuhan administrasi ini dipicu oleh terbatasnya pemahaman nelayan mengenai pentingnya kelengkapan dokumen sebagai syarat keselamatan pelayaran dan kepastian hukum. Wawancara dengan Pengawas Perikanan Ahli Muda DKP Provinsi Sumatera Barat mempertegas bahwa ketidaklengkapan dokumen berbanding lurus dengan tingginya potensi praktik *illegal fishing*, seperti penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan penangkapan di luar zona izin. Kondisi ini mengancam keberlanjutan ekosistem laut serta memicu konflik sosial antar-nelayan.

Rendahnya tingkat kepatuhan regulasi dalam tataran birokrasi dan masyarakat umumnya berakar dari lemahnya sosialisasi serta budaya tata kelola publik yang belum terinternalisasi dengan baik (Frinaldi, 2017). Pengawasan yang tegas dan berkelanjutan dari instrumen birokrasi sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan publik dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ditetapkan (Frinaldi & Embi, 2011). Regulasi perikanan sebagaimana diatur dalam UU No. 45 Tahun 2009 tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol represif, melainkan sebagai instrumen perlindungan bagi nelayan itu sendiri dari risiko kecelakaan laut dan degradasi sumber daya ikan (Nisari et al., 2025).

#### **Dinamika Sosial-Ekonomi dan Kerentanan Nelayan Skala Kecil**

Meskipun intervensi program pemerintah telah berjalan, nelayan di Kota Padang masih dihadapkan pada keterbatasan struktural yang kompleks. Fluktuasi iklim global dan perubahan pola cuaca ekstrem memicu ketidakpastian lokasi *fishing ground* dan frekuensi melaut (Aprilia et al., 2024). Pada musim angin barat atau cuaca buruk, nelayan skala kecil terpaksa tidak melaut selama berminggu-minggu, yang berimplikasi langsung pada hilangnya pendapatan rumah tangga.

Ketidakpastian pendapatan ini menimbulkan tekanan sosial dan psikologis yang signifikan bagi keluarga nelayan (Gushendri et al., 2023). Keterbatasan akses permodalan formal memaksa sebagian nelayan menggantungkan pembiayaan operasional melaut pada tengkulak atau pemilik modal (*punggawa*). Pola hubungan patron-klien ini menempatkan nelayan pada posisi tawar (*bargaining power*) yang sangat lemah dalam penentuan harga jual ikan di pasar lokal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi hasil tangkapan semata tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi nelayan (Mufti et al., 2025). Kesejahteraan nelayan sangat dipengaruhi oleh ekosistem pendukung yang utuh, yang mencakup kelembagaan lokal yang kuat, kepastian harga, serta akses modal yang adil dan inklusif (Nurliani et al., 2023).

#### **Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kelompok Nelayan**

Untuk mengatasi kesenjangan antara potensi sumber daya laut dan tingkat kesejahteraan nelayan, program bantuan fisik perlu diimbangi dengan pendekatan *soft-skill* berupa pelatihan manajemen usaha, penguatan kelompok nelayan, dan edukasi konservasi laut. Di kawasan Bungus Teluk Kabung, keberadaan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus telah memfasilitasi integrasi antara pembinaan teknis, pelayanan perizinan, dan distribusi hasil tangkapan. Namun, di wilayah pesisir berbasis kelompok tradisional seperti Pasia Nan Tigo dan Pasia Jambak, pendampingan kelembagaan secara intensif masih sangat dibutuhkan (Nurmahmudin et al., 2024).

Kualitas sumber daya manusia merupakan determinan utama dalam adopsi inovasi teknologi dan keberlanjutan usaha perikanan (Kewilaa, 2024). Nelayan yang terorganisir dalam kelompok pembudidaya/penangkap ikan (KUB) yang aktif memiliki akses yang lebih baik terhadap bantuan pemerintah, informasi pasar, dan program

perlindungan sosial. Oleh karena itu, DKP Provinsi Sumatera Barat perlu mengoptimalkan peran penyuluh lapangan guna mendorong penguatan kapasitas mandiri kelompok nelayan di Kota Padang (Windi, 2025).

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas program peningkatan kapasitas penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang, dapat disimpulkan beberapa hal utama. Pertama, intervensi kebijakan publik yang direalisasikan melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana tangkap seperti mesin tempel, perahu, jaring, dan *fishbox* telah terbukti efektif dalam meningkatkan mobilitas, memperluas jangkauan area penangkapan ikan, serta menekan tingkat kerusakan hasil tangkapan nelayan. Bantuan fisik ini memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kualitas produksi perikanan di wilayah sasaran utama seperti Bungus Teluk Kabung, Pasia Nan Tigo, dan Pasia Jambak.

Kedua, peningkatan aspek operasional dan produksi perikanan belum diimbangi secara optimal oleh tingkat kepatuhan legalitas dan administrasi. Temuan di lapangan menunjukkan masih ditemukannya kapal nelayan yang beroperasi tanpa dokumen izin perikanan dan kelaikan pelayaran yang lengkap. Kondisi ini memicu tingginya risiko praktik penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) yang mengancam kelestarian sumber daya laut serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nelayan itu sendiri. Hal tersebut menegaskan bahwa fungsi pengawasan, pembinaan, dan penyuluhan regulasi oleh instansi birokrasi pemerintah daerah masih perlu diperketat dan disosialisasikan secara masif.

Ketiga, terdapat kesenjangan antara potensi sumber daya perikanan yang melimpah dengan realitas kesejahteraan nelayan skala kecil di Kota Padang. Kerentanan sosial-ekonomi nelayan masih dipengaruhi oleh fluktuasi iklim, ketidakpastian pendapatan, serta ketergantungan pada jaringan permodalan informal. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sektor perikanan tangkap di Kota Padang tidak cukup hanya bertumpu pada distribusi bantuan sarana fisik semata. DKP Provinsi Sumatera Barat direkomendasikan untuk memperkuat program pemberdayaan berbasis *soft-skill*, yang mencakup pendampingan kelembagaan kelompok nelayan, edukasi manajemen keuangan, fasilitasi akses modal formal, serta edukasi penangkapan ikan yang ramah lingkungan secara berkelanjutan.

#### Reference

- Aprilia, R., Suherman, A., & Kurniawan, A. (2024). Analisis Fluktuasi Hasil Tangkapan Nelayan Berdasarkan Kondisi Musim Di Wilayah Pesisir Sumatera Barat. *Jurnal Perikanan Tangkap Indonesia*, 12(1), 45–56. <https://doi.org/10.14710/Jpti.V12i1.4556>
- Campbell, J. P. (1988). On The Nature Of Organizational Effectiveness. Dalam P. S. Goodman & J. M. Pennings (Eds.), *New Perspectives On Organizational Effectiveness* (Hlm. 13–55). Jossey-Bass.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (5th Ed.). SAGE Publications.
- Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. (2025). *Data Rekapitulasi Pemeriksaan Kapal Nelayan Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2025*. DKP Provinsi Sumatera Barat.
- Frinaldi, A. (2017). *Kultur Birokrasi Dan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Empiris*. UNP Press.
- Frinaldi, A., & Embi, M. A. (2011). Faktor Budaya Kerja Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 112–124. <https://doi.org/10.24036/Jian.V11i2.112>
- Gushendri, R., Putra, A., & Handayani, S. (2023). Tingkat Kecemasan Dan Kerentanan Sosial Ekonomi Nelayan Tradisional Di Pesisir Sumatera Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 18(2), 189–201. <https://doi.org/10.15578/Jsekp.V18i2.189>
- Kementerian Kelautan Dan Perikanan. (2024). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2024*. KKP RI. <https://kkp.go.id/Laporan-Kinerja-2024>
- Kewilaa, M. (2024). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Nelayan Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Usaha. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, 6(1), 33–42. <https://doi.org/10.30598/Jpmp.V6i1.3342>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mufti, F., Hasan, M., & Kusuma, D. (2025). Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Nelayan Oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kebijakan Publik Dan Administrasi*, 19(1), 77–89. <https://doi.org/10.22146/Jkpa.V19i1.7789>
- Mulyani, S., Yuliani, E., & Rahmad, T. (2023). Peran Infrastruktur Pangkalan Pendaratan Ikan Terhadap Stabilitas Harga Dan Pendapatan Nelayan. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, 11(3), 205–216. <https://doi.org/10.29244/Jms.V11i3.205>
- Nisari, I., Pratama, R., & Triana, L. (2025). Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 21(1), 12–25. <https://doi.org/10.14710/Japi.V21i1.1225>
- Nurliani, N., Baharuddin, B., & Fitriani, F. (2023). Kerentanan Ekonomi Dan Daya Tawar Nelayan Kecil Di Kawasan Pesisir. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 7(4), 1410–1422. <https://doi.org/10.21776/Ub.Jepa.2023.007.04.14>
- Nurmahmudin, A., Firmansyah, F., & Syarif, H. (2024). Pembinaan Kelembagaan Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Kapasitas Usaha Perikanan Di Pasia Nan Tigo. *Jurnal Riset Akuakultur Dan Perikanan Tangkap*, 9(2), 98–109. <https://doi.org/10.15578/Jrapt.V9i2.9809>
- Rahim, A., Hastuti, D., & Supriadi, S. (2023). Kendala Teknis Dan Finansial Usaha Penangkapan Ikan Nelayan Tradisional. *Jurnal Ilmu Kelautan Dan Perikanan*, 33(1), 54–63. <https://doi.org/10.20956/Jipk.V33i1.5463>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118. <https://peraturan.go.id/Id/Uu-No-31-Tahun-2004>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. <https://peraturan.go.id/Id/Uu-No-45-Tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. <https://peraturan.go.id/Id/Uu-No-23-Tahun-2014>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12932>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Windi, A. (2025). Keterbatasan Armada Dan Jangkauan Operasi Nelayan Skala Kecil Di Kota Padang. *Jurnal Maritim Dan Pesisir*, 8(1), 22–31. <https://doi.org/10.25077/Jmp.V8i1.2231>